

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Nur. 2022. "Pertimbangan Hakim terhadap Bukti Elektronik dalam Putusan Perceraian."
- Anshori, Abdul Ghofur. 2018. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Harahap, M. Yahya. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHPerdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2017. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Herzien Inlandsch Reglement (HIR). Staatsblad 1941 Nomor 44.
- Huda, Chairul. 2021. "Pemanfaatan Bukti Elektronik dalam Perkara Perceraian." *Jurnal Hukum dan Peradilan*.
- Ibrahim, Johnny. 2012. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. 2020. *Pedoman Implementasi UU ITE*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Latifah, A. 2023. "Digital Evidence dalam Pembuktian Perselingkuhan." *Jurnal Peradilan Agama*.
- Makarim, Edmon. 2017. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Mertokusumo, Sudikno. 2013. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno. 2019. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Moleong, Lexy J. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Abdulkadir. 2000. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mustofa. Hakim Pengadilan Agama Surabaya. Wawancara, 31 Oktober 2025.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.
- Rahardjo, Satjipto. 2017. *Hukum Progresif*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Ramli, Ahmad M. 2004. *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Ramli, Ahmad M. 2018. *Hukum Pembuktian Digital*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg). Staatsblad 1927 Nomor 227.
- Satrio, J. 2019. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subekti, R. 2008. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Widyanto, A. 2021. "Bukti Elektronik dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama." *Jurnal Hukum Perdata Islam*.